

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA
MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2021)**

**Elfira Shifana Hastanti, Kurnia Rina Ariani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh sehingga total sampel ada 38 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Data dalam penelitian ini diuji menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal yang artinya H_1 dan H_2 diterima. Belanja Modal tidak dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang artinya H_3 ditolak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, yang artinya H_4 dan H_5 diterima. Belanja Modal tidak dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang artinya H_6 ditolak. Belanja Modal dapat mempengaruhi Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang artinya H_7 diterima.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Luas Wilayah, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Abstract

The purpose of this study is to analyze and examine the effect of Local Own-Source Revenue and Area on the Human Development Index (HDI) through Capital Expenditures. The research method used is a quantitative method. The population in this study is The Regency/City of East Java Province for the 2019-2021 period. This study uses the saturation sampling method so total sample is 38 consisting of 29 district and 9 cities. The data of this study were tested using multiple linear regression models. The results of this study indicate that Local Own-Source Revenue and the Area has an influence on Capital Expenditures, which means H_1 and H_2 are accepted. Capital Expenditure cannot affect the Human Development Index (HDI), which means H_3 is rejected. Local Own-Source Revenue and Area have an influence on the Human Development Index, which means that H_4 and H_5 are accepted. Capital Expenditures cannot affect Local Own-Source Revenue against the Human Development Index (HDI), which means that H_6 is rejected. Capital Expenditure can affect the Area against the Human Development Index (HDI), which means that H_7 is accepted.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Area, Capital Expenditures, Human Development Index (HDI).

1. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia diartikan sebagai pertumbuhan yang membawa dampak positif dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. Fokus utama pembangunan manusia terdapat pada manusia dan kesejahteraannya. Pembangunan manusia menggambarkan pada pengembangan pilihan masyarakat untuk hidup penuh kebebasan dan berkelas. Pembangunan manusia juga menunjukkan tentang peningkatan kemampuan individu dan komunitasnya untuk mengembangkan jangkauan pilihan masyarakat guna memenuhi aspirasi mereka.

United Nations Programme (UNDP) menempatkan manusia sebagai suatu kekayaan negara dalam pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari sisi perdagangan, investasi, dan teknologi. Namun hal itu dinilai bahwa manusia sebagai alat mencapai pertumbuhan bukan sebagai tujuan dari pembangunan manusia. Mempunyai sumber daya manusia yang unggul merupakan tanggung jawab moral bangsa (Astri, 2013). Menurut *Human Development Index* (HDI) UNDP tahun 2020, posisi Indonesia pada peringkat daya saing negara di internasional berada pada peringkat 107 dari 189 negara dengan skor 71,94. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), skor IPM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 berada di skor 72,75. Sedangkan, skor IPM pada tahun 2021 berada di skor 72,14 dan pada tahun 2020 berada pada skor 71,71. Dari sini terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan beberapa aspek seperti aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. IPM bertujuan mengukur pencapaian pembangunan manusia yang berbasis dari sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia (Riviando, 2019). IPM sebagai indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (Juliarini, 2018). Tingginya nilai IPM sebagai capaian keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk belanja modal untuk menambah aset tetap (Assyurriani, 2015). Alokasi belanja modal tersebut berdasarkan pada kebutuhan daerah, sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dananya

dalam bentuk belanja modal dalam APBD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam memperoleh pendapatan daerah serta belanja daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan desentralisasi. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjaga ketersediaan alokasi belanja modal di tengah keterbatasan ketersediaan anggaran dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan tujuan peningkatan pembangunan manusia (Komariah, 2019). Jika belanja modal meningkat maka akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang mana dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat IPM, karena salah satu komponen IPM adalah daya beli (Firdayanti, 2020).

Daerah dengan wilayah yang lebih luas maka akan membutuhkan pelayanan publik yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang wilayahnya tidak begitu luas (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Hal tersebut sebagai syarat pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana, dengan begitu dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut (Widiasmara, 2019). Pembangunan dapat dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral berfokus pada kegiatan di berbagai sektor wilayah tersebut. Sedangkan, pendekatan regional (wilayah) berfokus pada pemanfaatan ruang dan interaksi berbagai kegiatan dalam suatu wilayah. Pendekatan regional (pewilayahan) merupakan suatu pendekatan guna mengelola dan mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut (Latuconsina, 2017).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya ekonomi serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing melalui peraturan yang dibuat oleh kepala daerah. Setiap daerah memiliki pendapatan daerah yang berbeda karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda (Pratama & Kartika, 2017).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD digunakan untuk Belanja Modal. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

Belanja Modal yakni semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah, maka semakin tinggi pula suatu daerah merealisasikan Belanja Modal pemerintah daerah dalam mengalokasikan pengeluaran daerahnya untuk peningkatan sarana dan prasarana serta pembangunan di daerahnya.

Jumlah PAD ditentukan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, apabila PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga akan meningkat (Kurniasari & Kurnia, 2021). Sektor pendapatan daerah memiliki peranan penting karena melalui sektor ini dapat melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah tersebut.

Realisasi pendapatan daerah dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan daerah seperti sarana dan prasarana, transportasi, sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pembangunan lainnya dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rakhmawati (2017), peningkatan pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah berarti memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada berbagai sektor yang mendukung IPM.

Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening telah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya yaitu (Kurniasari & Kurnia, 2021), (Adiputra, 2015), (Pratama & Kartika, 2017), (Firdayanti, 2020), (Riviando et al., 2019), (Verawaty et al., 2020), (Zaufi et al., 2016) dengan menggunakan variabel independen yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari & Kurnia, 2021) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening menyatakan bahwa PAD, DBH, dan DAK terbukti tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini dikarenakan peningkatan PAD dalam bentuk pajak, retribusi, dan pendapatan lain daerah belum mengoptimalkan fungsi aset dan pelayanan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Untuk DBH, semakin tinggi DBH belum tentu meningkatkan IPM dikarenakan perlu persiapan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk pembangunan daerah. Sedangkan, DAK belum mampu menunjang pembangunan dikarenakan jumlah DAK lebih kecil dibanding dengan DAU dan juga program serta kebutuhan di daerah yang masih minim membutuhkan biaya pelayanan yang cukup besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. DAU berpengaruh positif terhadap IPM ini berarti transfer DAU dapat mewujudkan peningkatan pelayanan daerah

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana IPM juga akan meningkat. Pengalokasian DAU dapat membantu memenuhi pendanaan, fungsi layanan dasar dan gaji pegawai dapat memotivasi agar terciptanya pelayanan yang baik. Pengalokasian DAU yang efektif dalam penyelenggaraan serta tata kelola yang baik dapat meningkatkan IPM. Di lain pihak, Belanja Modal tidak mempengaruhi PAD dan DBH terhadap IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dikarenakan proporsi PAD yang dialokasikan ke belanja modal belum cukup mendanai infrastruktur fasilitas umum pada bidang kesehatan maupun pendidikan serta di berbagai sektor lainnya yang memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan IPM. Sedangkan, DBH bersifat fluktuatif dari pendapatan APBN disesuaikan oleh potensi daerah itu sendiri. Prosentase pengalokasian DBH kurang berkontribusi dalam menunjang belanja modal untuk membiayai pembangunan sarana & prasarana publik maupun menanggulangi ketimpangan fiskal sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, Belanja Modal mempengaruhi secara positif DAK dan DAU terhadap IPM. Pengalokasian DAU untuk memenuhi kebutuhan fiskal melalui anggaran belanja modal dapat melaksanakan penataan daerah berupa pemenuhan pada kebutuhan optimal serta pembangunan sarana & prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan IPM. DAK ditujukan untuk membiayai operasional khusus yang berupa bantuan & tunjangan pengalokasian DAK baik maupun non fisik. Jika DAK meningkat, maka akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk alokasi belanja modal yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Hal ini berarti DAK dan DAU memiliki peran khusus dalam peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kualitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat sehingga akan mempengaruhi tingkat IPM.

Menurut (Riviando et al., 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM karena peningkatan pendapatan asli daerah yang terjadi tidak berperan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap IPM. Pemerintah daerah memfokuskan pengalokasian DAU demi pembangunan manusia.

Alokasi dana perimbangan atau Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) meningkat setiap tahunnya, sehingga pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat memanfaatkan peluang DAK untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Di lain pihak, variabel Belanja Modal tidak mempengaruhi PAD dan DAU terhadap IPM. Belanja modal belum mampu meningkatkan pengaruh PAD terhadap pembangunan daerah tersebut dikarenakan belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah belum mampu dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah. Sedangkan, penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal mempengaruhi positif signifikan variabel DAK terhadap IPM. DAK yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat mampu meningkatkan IPM di daerah tersebut. Hal ini berarti, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat memanfaatkan DAK yang dialokasikan melalui belanja modal secara efektif.

Dalam penelitian (Verawaty et al., 2020) dengan judul Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Melalui Alokasi Belanja Modal dengan menggunakan variabel independen PAD, DAU, DAK, DBH, SiLPA, Tingkat Jumlah Penduduk (TJP), dan PDRB menyatakan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. PAD akan membuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya lebih besar sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berdampak pada peningkatan IPM. IPM sebagai salah satu alokator DAU dalam upaya mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah. Wilayah dengan IPM rendah akan memperoleh alokasi dana yang berlebih untuk meningkatkan IPM. DBH merupakan dana yang bersifat *block grants* yaitu penggunaan sumber dana yang ditentukan daerah itu sendiri melalui keputusan daerah sesuai prioritas daerah yang menyebabkan pengelolaan DBH tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerahnya. Sehingga mampu membiayai pembangunan yang mana berdampak pada IPM. Sedangkan DAK, SiLPA, TJP, dan PDRB tidak berpengaruh terhadap IPM. Alokasi DAK yang tinggi belum tentu dapat meningkatkan IPM. SiLPA pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak menjadi sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah karena memiliki sumber lain seperti, PAD, DAU, dan DBH. SiLPA yang tinggi tidak berarti pembangunan manusia pada daerah tersebut meningkat. Pertambahan pada jumlah penduduk yang begitu besar memiliki implikasi yang cukup luas terhadap program pembangunan. Apabila pertambahan penduduk yang besar dengan kualitas

yang rendah, maka hanya akan menjadi beban pembangunan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum mampu meningkatkan IPM di daerah tersebut dikarenakan oleh relatif kecilnya pendapatan yang dimiliki masyarakat yang berakibat pada kemampuan daya beli masyarakat yang rendah sehingga memperlambat peningkatan pembangunan manusia. DAU dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 tentang sumber pendanaan pemerintah daerah dalam APBD yaitu DAU, digunakan untuk belanja daerah salah satunya belanja modal. Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan DBH yang besar cenderung mempunyai belanja modal yang besar. DBH merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial dan modal dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan serta memenuhi belanja daerah, salah satunya belanja modal. Sedangkan, PAD, DAK, SiLPA, TJP, dan PDRB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja rutin atau belanja operasional. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan tidak bergantung pada DAK untuk menambah aset baik aset tetap maupun aset lain disebabkan Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan dapat memenuhi kebutuhan belanja modal menggunakan DAU. Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan juga tidak menggunakan SiLPA secara maksimal seperti yang tercantum dalam pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, membantu mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung seperti belanja modal sehingga pembangunan daerah yang belum terealisasi di tahun sebelumnya dapat terealisasi. Meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak ditandai dengan meningkatnya belanja modal. PDRB bukan menjadi acuan utama pada proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kontribusi dana perimbangan lebih besar daripada PDRB di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal mengintervensi DAU dan DBH terhadap IPM. Proporsi DAU kabupaten/kota yang besar akan membuat pemerintah daerah menggunakannya untuk belanja daerah sehingga memperbesar alokasi belanja modal yang berkaitan dengan program peningkatan sarana & prasarana serta infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan fiskal dan meningkatkan pembangunan manusia. DBH digunakan membiayai belanja modal untuk kebutuhan pembangunan daerah akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat karena

dialokasikan untuk salah satu indikator pembangunan manusia. Sedangkan, Belanja Modal tidak mengintervensi PAD, DAK, SiLPA, TJP, dan PDRB terhadap IPM. PAD secara langsung dapat meningkatkan IPM tanpa dialokasikan ke belanja modal. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendanaan adalah PAD yang mana fungsinya dialokasikan untuk layanan umum, ketertiban & keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan & fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial. Pendidikan dan kesehatan merupakan indikator IPM. DAK Provinsi Sumatera Selatan tidak dialokasikan untuk belanja modal yang bertujuan meningkatkan IPM melalui indikator seperti bidang kesehatan dan pendidikan melainkan dialokasikan untuk belanja lain seperti infrastruktur, perikanan & kelautan, dan prasarana pemerintah (Kemenkeu No. 548 Pasal 3). Sehingga DAK yang tinggi belum tentu mengakibatkan IPM yang tinggi. SiLPA bukan merupakan sumber penerimaan pembiayaan dalam mewujudkan pembangunan daerah dimana tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak sesuai dengan UU No. 53 Tahun 2009, meningkatnya jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah serta persebaran dan mutunya yang sedemikian rupa maka hanya akan menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksi yang rendah sehingga akan menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. Hal tersebut tidak menunjukkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui belanja modal terhadap IPM. Nilai PDRB per kapita tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan publik diukur melalui IPM.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Zaufi et al., 2016) dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau menyatakan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Semakin tinggi PAD maka dapat mendorong IPM di daerah Riau. Pemerintah daerah di Provinsi Riau dapat mengalokasikan PAD secara baik & tepat sasaran sehingga IPM di Provinsi Riau melalui PAD berjalan sesuai arahan. Pemerintah daerah Riau dapat mengalokasikan DAU secara efektif sehingga IPM di Provinsi Riau berjalan sesuai arahan. Sedangkan, Desentralisasi Fiskal, DAK, dan Belanja Modal tidak mempengaruhi terhadap IPM. Desentralisasi Fiskal yang kuat belum tentu akan dana yang berada berada di Desentralisasi Fiskal akan dialokasikan ke IPM, sehingga IPM di

beberapa daerah di Provinsi Riau terlihat belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan hidup yak di daerah masing-masing. Dana yang terdapat dalam DAK belum tentu dialokasikan ke IPM, sehingga IPM antar daerah terlihat timpang. Dana yang terdapat dalam belanja modal belum tentu dialkosikan ke IPM, sehingga IPM antar daerah kurang optimal. Belanja Modal tidak memediasi Desentralisasi Fiskal dan DAU terhadap IPM. Dana yang sepenuhnya berada di Desentralisasi Fiskal dan DAU yang dialokasikan ke belanja modal untuk keperluan indeks pembangunan manusia kurang optimal. Namun, Belanja Modal memediasi DAK terhadap IPM. Hal ini berarti dana yang terdapat dalam Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan ke dalam belanja modal untuk keperluan IPM sepenuhnya secara optimal dan tepat sasaran.

Menurut (Pratama & Kartika, 2017) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan SiLPA Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal di Provinsi Bali menyatakan bahwa ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali. SiLPA dapat meningkatkan belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bali. SiLPA dapat mempengaruhi IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja Modal memediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Belanja modal dapat memperbesar pengaruh PAD terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal juga memberikan pengaruh SiLPA terhadap IPM.

Menurut penelitian (Adiputra, 2015) yang berjudul Pengaruh PAD, SiLPA, dan Dana Perimbangan Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM. Artinya, semakin tinggi PAD maka akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Sedangkan, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap IPM. DAU yang diterima oleh Pemerintah daerah di Bali tidak bisa meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan juga pengalokasian DAU difokuskan pada tujuan lain seperti peningkatan kualitas perekonomian di daerah tersebut. Pembangunan kualitas manusia tidak hanya dijelaskan

dari segi kuantitas (fisik, bangunan) tetapi juga dari segi kualitas (hidup, manusia). Sementara itu, DAK diperuntukkan pada peningkatan sarana & prasarana (fisik) serta jumlah DAK lebih sedikit daripada dana lain, seperti PAD & DAU. Pemerintah daerah di Bali memfokuskan alokasi DBH ke tujuan lain di bidang perekonomian dan tidak memfokuskan ke peningkatan kualitas SDM-nya. SiLPA tidak berhubungan langsung dengan pembangunan manusia. Dana tersebut digunakan dahulu untuk membeli sarana & prasarana publik yang bermanfaat untuk masyarakat. Belanja Modal belum mampu memediasi PAD, DAU, DAK, dan DBH, terhadap IPM. Besarnya PAD yang dialokasikan pada belanja modal tidak digunakan ke program-program yang tepat dan berpengaruh pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. DAU yang diterima oleh pemerintah daerah di Bali tidak digunakan untuk peningkatan pelayanan publik yang dialokasikan ke belanja modal. Mungkin dialokasikan ke pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai dan belanja daerah lainnya. Sementara itu, DAK yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi Bali digunakan untuk pelayanan publik, karena kecilnya prosentase, maka tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Pemerintah daerah di Provinsi Bali minim dalam menggunakan DBH dalam alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam hal ini, alokasi belanja modal tidak dapat memediasi DBH terhadap kualitas pembangunan manusia. Sedangkan, Belanja modal mampu memediasi SiLPA terhadap IPM. Artinya, sisa lebih pembiayaan anggaran bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia yang berasal dari SiLPA yang dialokasikan ke belanja modal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Firdayanti, 2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018) menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi PAD, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dikarenakan alokasi belanja modal ditentukan oleh besarnya penerimaan PAD, berdasarkan pemanfaatan oleh beberapa pos penerimaan pos yang ada. Tingginya PAD dialokasikan ke belanja modal digunakan untuk pembangunan dan perkembangan di daerah yang akan direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur guna kepentingan publik. DAU yang berasal dari pemerintah pusat digunakan pemerintah daerah setempat untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah

melalui belanja modal. Semakin besar DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka semakin besar belanja modal yang dianggarkan. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Disebabkan oleh adanya pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun pendapatan belum maksimal, IPM menunjukkan progress cukup baik di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ketika pendapatan masyarakat mulai mengalami peningkatan, maka akan ada alokasi pada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Dari hasil penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang tidak konsisten sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening dengan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kurniasari & Kurnia, 2021). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini mengubah variabel Dana Perimbangan dari penelitian (Kurniasari & Kurnia, 2021) menjadi variabel Luas Wilayah. Bertitik tolak dari hal-hal diatas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN LUAS WILAYAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR”.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2021 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 yang berjumlah 29 kabupaten dan 9 kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *sampling* jenuh. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 9 kota dengan total 38 sampel. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Regresi Linear Berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

3.3.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil yang diperoleh dari analisis deskripsi menunjukkan data sebagai berikut:

**Tabel.1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	94	25.60	27.66	26.4701	.49033
LW	94	20.21	1998.54	1027.1405	615.21502
BM	94	25.18	27.08	26.2887	.43926
IPM	94	61.94	82.04	71.6028	4.87865
Valid N (listwise)	94				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21, 2023

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel di atas, maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 rata-ratanya mencapai 26,4701 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah sebesar 25,60 (Kota Pasuruan, 2021) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sebesar 27,66 (Kabupaten Gresik, 2021).
- 2) Luas Wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 rata-ratanya mencapai 1027,1405. Luas Wilayah terkecil sebesar 20,21 Km² oleh (Kota Mojokerto, 2019-2021) dan Luas Wilayah terluas sebesar 1998,54 Km² oleh (Kabupaten Sumenep, 2019-2021).
- 3) Belanja Modal kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 rata-ratanya mencapai 26,2887. Belanja Modal terendah sebesar 25,18 oleh Kota Probolinggo 2020 dan Belanja Modal tertinggi sebesar 27,08 (Kabupaten Kediri, 2019).
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 rata-ratanya mencapai 71,6028 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah sebesar 61,94 (Kabupaten Sampang, 2019) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi sebesar 82,04 (Kota Malang, 2021).

3.3.2. Uji Asumsi Klasik

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data ini bertujuan untuk menguji nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak normal. Penentuan data normal atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil hitung. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menggunakan Monte Carlo dengan nilai signifikansi 0,777 pada model persamaan regresi I dan 0,058 pada model persamaan regresi II lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model penelitian ini menunjukkan sebaran datanya normal. Hasil dari uji normalitas terdapat pada tabel 2 dan tabel 3.

Model Persamaan Regresi I:

**Tabel.2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		94	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.33398917	
Most Extreme Differences	Absolute	.067	
	Positive	.067	
	Negative	-.056	
Test Statistic		.067	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.777 ^e	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.766
		Upper Bound	.788

Sumber: Data diolah, 2023

Model Persamaan Regresi II:

**Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		94	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.43920927	
Most Extreme Differences	Absolute	.136	
	Positive	.071	
	Negative	-.136	
Test Statistic		.136	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.058 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.052
		Upper Bound	.064

Sumber: Data diolah, 2023

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam model regresi berganda. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan nilai *Tolerance Value* (TF) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Ketentuan dalam uji multikolinearitas yaitu jika nilai signifikansi *Tolerance* $\geq 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 maka menunjukkan bahwa data tidak terjadi multikolonieritas. Hasil pengujian multikolonieritas dalam penelitian ini terdapat pada tabel 4 dan tabel 5.

Model Persamaan Regresi I:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PAD	,928	1,078	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LW	,928	1,078	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2023

Model Persamaan Regresi II:

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PAD	,785	1,274	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LW	,683	1,464	Tidak Terjadi Multikolinearitas
BM	,578	1,730	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 dan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen terbukti tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dikarenakan seluruh variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah, dan Belanja Modal memiliki nilai signifikansi *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai signifikansi VIF < 10 sehingga menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian residual untuk model regresi linear. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui uji Spearman-Rho. Ketentuan pengambilan keputusan dalam uji Spearman-rho yaitu jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas dan sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini terdapat pada tabel 6 dan tabel 7.

Model Persamaan Regresi I:

Tabel 6. Correlations

			PAD	LW	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1.000	.259*	-.004
		Sig. (2-tailed)	.	.012	.967
		N	94	94	94
	LW	Correlation Coefficient	.259*	1.000	-.048
		Sig. (2-tailed)	.012	.	.648
		N	94	94	94
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.004	-.048	1.000
		Sig. (2-tailed)	.967	.648	.
		N	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah, 2023

Model Persamaan Regresi II:

Tabel 7. Correlations

			PAD	LW	BM	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1.000	.259*	.427**	-.079
		Sig. (2-tailed)	.	.012	.000	.451
		N	94	94	94	94
	LW	Correlation Coefficient	.259*	1.000	.446**	.045
		Sig. (2-tailed)	.012	.	.000	.667
		N	94	94	94	94
	BM	Correlation Coefficient	.427**	.446**	1.000	.054
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.604
		N	94	94	94	94
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.079	.045	.054	1.000
		Sig. (2-tailed)	.451	.667	.604	.
		N	94	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 6 dan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa setiap variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Luas Wilayah, dan Belanja Modal memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga model

regresi dalam penelitian ini terbebas dari ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lainnya atau tidak terjadi heterokedastisitas.

3.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi variabel dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (DW). Ketentuan pengambilan keputusan dalam uji *Durbin Watson* (DW) yaitu jika nilai *Durbin Watson* (DW) terletak diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi begitu sebaliknya jika nilai *Durbin Watson* (DW) dibawah -2 dan diatas +2 maka ada autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dalam penelitian ini terdapat pada tabel 8 dan tabel 9.

Model Persamaan Regresi I:

Tabel 8. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.650 ^a	.422	.409	.33764	1.339

a. Predictors: (Constant), LW, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data diolah, 2023

Model Persamaan Regresi II:

Tabel 9. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.866 ^a	.750	.742	2.47953	1.972

a. Predictors: (Constant), BM, PAD, LW

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji autokorelasi pada tabel 8 dan tabel 9 diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) dalam model penelitian ini sebesar 1,339 dan 1,972. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 1,339 dan 1,972 berada diantara -2 dan +2 sehingga model regresi tidak terjadi autokorelasi atau tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan pengganggu periode t-1.

3.3.3. Pengujian Hipotesis

3.3.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel terikat dalam penelitian. Ketentuan dalam pengambilan keputusan uji t yaitu jika nilai t signifikasinya $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima begitu sebaliknya jika nilai t signifikasinya $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hasil uji t dalam penelitian ini terdapat pada tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.969	1.947		9.227	.000
	PAD	.301	.074	.336	4.063	.000
	LW	.000	.000	.473	5.709	.000

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 11. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13.457	19.897		-.676	.501
	PAD	4.696	.592	.472	7.935	.000
	LW	-.006	.001	-.818	-12.822	.000
	BM	-1.240	.770	-.112	-1.610	.111

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 10 dan tabel 11 diatas, maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur karena nilai t signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,005$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 dapat diterima.
- b. Luas Wilayah pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikansi sebesar sebesar 0,000. Hal ini berarti Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur karena nilai t signifikansi variabel Luas Wilayah sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa H_2 diterima.

- c. Belanja Modal pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikasi sebesar 0,111. Hal ini berarti Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur karena t signifikasi variabel Belanja Modal sebesar 0,111 yang nilainya $> 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa H_3 ditolak.
- d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikasi sebesar 0,000. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur karena t signifikasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa H_4 diterima.
- e. Luas Wilayah pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikasi sebesar sebesar 0,000. Hal ini berarti Luas Wilayah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur karena nilai t signifikasi variabel Luas Wilayah sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa H_5 diterima.
- f. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal pada tabel diatas menunjukkan nilai B sebesar sebesar -0,373. Hal ini berarti Belanja Modal tidak memediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur karena nilai B variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,373 yang nilainya $< 4,696$ sehingga disimpulkan bahwa H_6 ditolak.
- g. Luas Wilayah melalui Belanja Modal pada tabel diatas menunjukkan nilai B sebesar 0,000. Hal ini berarti Belanja Modal memediasi Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur karena nilai B variabel Luas Wilayah sebesar 0,000 yang nilainya $> -0,006$ sehingga disimpulkan bahwa H_7 diterima.

3.3.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui unsur-unsur variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau tidak. Ketentuan dalam pengambilan keputusan uji F yaitu jika nilai F signifikasi $< 0,005$ maka hipotesis dapat diterima begitu sebaliknya jika nilai F signifikasi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hasil uji F dalam penelitian ini terdapat pada tabel 12 dan 13.

Tabel 12 Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.570	2	3.785	33.202	.000 ^b
	Residual	10.374	91	.114		
	Total	17.944	93			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), LW, PAD

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 13. Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1660.185	3	553.395	90.011	.000 ^b
	Residual	553.326	90	6.148		
	Total	2213.511	93			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), BM, PAD, LW

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji F pada tabel 12 dan tabel 13 diatas menunjukkan bahwa nilai F signifikansi model regresi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah secara simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

3.3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini terdapat pada tabel 14 dan tabel 15.

Tabel 14. Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 ^a	.422	.409	.33764

a. Predictors: (Constant), LW, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel 15. Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.866 ^a	.750	.742	2.47953

a. Predictors: (Constant), BM, PAD, LW

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 14 dan tabel 15 diatas menunjukkan bahwa nilai *adjusted* R^2 pada model regresi I sebesar 0,409 atau 40,9%. Hal ini berarti variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah dapat menjelaskan variabel dependen penelitian ini yaitu Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 40,9% dan 59,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian yang digunakan. Sedangkan, nilai *adjusted* R^2 pada model regresi II sebesar 0,742 atau 74,2%. Hal ini berarti variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Luas Wilayah, dan Belanja Modal dapat menjelaskan variabel dependen penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 74,2% dan 25,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian yang digunakan.

3.3.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Luas Wilayah, dan Belanja Modal terhadap variabel dependennya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil pengujian regresi linear berganda terdapat pada tabel 16 dan tabel 17.

Tabel 16. Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.969	1.947		9.227	.000	
	PAD	.301	.074	.336	4.063	.000	.928
	LW	.000	.000	.473	5.709	.000	.928

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 16 diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 LW + e$$

$$BM = 17,969 + 0,301PAD + 0,000LW + e$$

Tabel 17. Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-13.457	19.897		-.676	.501		
1 PAD	4.696	.592	.472	7.935	.000	.785	1.274
LW	-.006	.001	-.818	-12.822	.000	.683	1.464
BM	-1.240	.770	-.112	-1.610	.111	.578	1.730

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 17 diatas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 LW + \beta_3 BM + e$$

$$IPM = -13,457 + 4,696PAD + (-0,006LW) + (-1,240BM) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta pada tabel 16 memiliki nilai sebesar 17,969 yang artinya menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah diasumsikan dengan nilai nol maka Belanja Modal (BM) sebesar 17,969.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,301 yang artinya setiap penambahan 1 poin Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan Belanja Modal (BM) sebesar 0,301.
- Luas Wilayah (LW) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,000 yang artinya setiap penambahan 1 poin Luas Wilayah (LW) maka akan meningkatkan Belanja Modal (BM) sebesar 0,000.
- Konstanta pada tabel 17 memiliki nilai sebesar -13,457 yang artinya menunjukkan bahwa jika tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Luas Wilayah (LW), dan Belanja Modal (BM) atau diasumsikan dengan nilai nol maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar -13,457.

- e. Belanja Modal (BM) memiliki nilai koefisien regresi yang negatif sebesar -1,240 yang artinya setiap penambahan 1 poin Belanja Modal (BM) maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar -1,240.
- f. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 4,696 yang artinya setiap penambahan 1 poin Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,4,696.
- g. Luas Wilayah (LW) memiliki nilai koefisien regresi yang negatif sebesar -0,006 yang artinya setiap penambahan 1 poin Luas Wilayah (LW) maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar -0,006.
- h. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal (BM) memiliki nilai koefisien regresi yang negatif sebesar -0,373 yang artinya setiap penambahan 1 poin Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal (BM) maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar -0,373.
- i. Luas Wilayah (LW) melalui Belanja Modal (BM) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,000 yang artinya setiap penambahan 1 poin Luas Wilayah (LW) melalui Belanja Modal (BM) maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,000.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki t hitung sebesar 0,00. Nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal sehingga H_1 dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan sumber utama penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Pemerintah Daerah memaksimalkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai belanja-belanja daerah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam menyediakan dana penyelenggaraan otonomi daerah sesuai kinerja desentralisasi daerah (Marseno & Mulyani, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan memaksimalkan pengalokasian Belanja Modal semaksimal mungkin

sehingga mendorong pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya kepada masyarakat dengan mempertimbangkan segala pengeluaran yang berorientasi kepada masyarakat berupa pemenuhan sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjang peningkatan masa manfaat aset pelayanan publik, menambah aset pelayanan publik, dan menjaga kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Kartika, 2017), (Marseno & Mulyani, 2020), (Firdayanti, 2020), (Fretes, 2017), (Yovita, 2014), dan (Adiputra, 2015) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Verawaty et al., 2020) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

3.2.2 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian variabel Luas Wilayah (LW) memiliki t hitung sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel Luas Wilayah (LW) berpengaruh terhadap Belanja Modal sehingga H_2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Luas Wilayah (LW) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan semakin luas suatu wilayah maka akan semakin besar belanja modal yang dianggarkan sebab membutuhkan lebih banyak sarana & prasarana serta pembangunan infrastruktur yang lebih banyak.

Alokasi belanja modal dipengaruhi oleh besarnya daerah itu sendiri (Marseno & Mulyani, 2020). Daerah yang lebih luas, memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak agar dapat mengimbangi saran dan prasarana yang dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat serta mendukung produktivitas masyarakat di daerah tersebut maka dibutuhkan infrastruktur yang memadai yang sesuai dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Luas suatu wilayah dapat dijadikan sebagai tolak ukur suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur terutama dalam pembangunan jalan maupun jaringan. Pembangunan jalan raya akan memperlancar transportasi sehingga memudahkan arus barang dari daerah satu ke daerah lain dan dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Dari penjelasan

diasas, maka dapat disimpulkan bahwa pemekaran Luas Wilayah akan meningkatkan pendanaan untuk Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Marseno & Mulyani, 2020) dan (Widiasmara, 2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Luas Wilayah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

3.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil pengujian variabel Belanja Modal memiliki t hitung sebesar 0,111. Nilai signifikansi $0,111 > 0,05$ yang artinya nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga H_3 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti alokasi Belanja Modal yang kuat belum tentu dialokasikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga masih terlihat timpang di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur atau belum optimalnya peningkatan Pendidikan, Kesehatan serta Hidup Layak di beberapa daerah. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan masih terbilang sangat rendah dibandingkan pengeluaran pemerintah lainnya (Astri et al, 2013).

Pengalokasian Belanja Modal yang tepat sasaran dan lebih baik maka nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah akan terpenuhi. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Belanja Modal yang tinggi belum tentu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Rakhmawati et al, 2017), (Zaufi et al, 2016), (Muliza et al, 2017), dan (Astri et al, 2013) menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Indrajaya, 2019), (Umiyati et al., 2017), (Kompang, 2015), (Mirza, 2019), (Zakaria, 2018), (Tarumingkeng et al., 2021), (Pratowo, 2012), dan (Sasana, 2012) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki t hitung sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi ini

menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga H_4 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sektor pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah tersebut mampu membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. PAD akan membuat kemampuan daerahnya semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat yang akan berdampak pada IPM daerahnya (Verawaty et al., 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penggunaannya dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan peningkatan pelayanan publik yang akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah itu sendiri. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Rakhmawati et al., 2017), (Verawaty et al., 2020), (Adiputra, 2015), (Pratama & Kartika, 2017), (Zaufi et al., 2016), (Fretes, 2017), (Juliarini, 2018), dan (Sarkoro & Zulfikar, 2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari & Kurnia, 2021) dan (Riviando et al., 2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2.5 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil pengujian variabel Luas Wilayah memiliki t hitung sebesar 0,00. Nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel Luas Wilayah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga H_5 dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran untuk melihat dampak pembangunan suatu wilayah yang memiliki dimensi yang

luas, karena menunjukkan kualitas penduduk dalam hal kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak.

Pertumbuhan IPM suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor geografis maupun faktor demografis (Novitasari & Khikmah, 2019). Dari penelitian diatas disimpulkan bahwa semakin luas suatu wilayah maka nilai pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari & Khikmah, 2019) dan (Latuconsina, 2017) yang menunjukkan bahwa Luas Wilayah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2.6 Belanja Modal mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal memiliki B hitung sebesar -0,373. Nilai B $-0,373 < 4,696$. Hal ini berdasarkan dari perhitungan nilai B PAD terhadap Belanja Modal sebesar 0,301 dikalikan dengan nilai B BM terhadap IPM sebesar -1,240 sehingga mendapatkan hasil sebesar -0,373. Sedangkan, Nilai B PAD terhadap IPM sebesar 4,696. Hal ini menunjukkan $-0,373 < 4,696$ yang artinya nilai B hitung ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal tidak memediasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga H_6 dapat ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tanpa melewati alokasi Belanja Modal.

Proporsi PAD yang dialokasikan ke belanja modal belum cukup mendanai pembangunan infrastruktur fasilitas umum dalam bidang pendidikan maupun kesehatan (Kurniasari & Kurnia, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) fungsinya antara lain dialokasikan untuk layanan umum, ketertiban dan keamanan, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, lingkungan hidup, perumahan & fasilitas umum, kesehatan, dan perlindungan sosial. Adapun Pendidikan dan Kesehatan berkaitan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Verawaty et al., 2020), (Kurniasari & Kurnia, 2021), (Riviando et al., 2019), dan (Adiputra, 2015) yang

menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Kartika, 2017) yang menunjukkan bahwa Belanja Modal mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2.7 Belanja Modal mempengaruhi Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil pengujian variabel Luas Wilayah melalui Belanja Modal memiliki B hitung sebesar 0,00. Nilai $B_{0,000} > -0,006$. Hal ini berdasarkan dari perhitungan nilai B_{LW} terhadap Belanja Modal sebesar 0,000 dikalikan dengan nilai B_{LW} terhadap IPM sebesar -0,006 sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,000. Sedangkan, Nilai B_{LW} terhadap IPM sebesar -0,006. Hal ini menunjukkan $0,000 > -0,006$ yang artinya nilai B hitung ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memediasi Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga H_7 dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memediasi Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan alokasi belanja modal suatu daerah digunakan salah satunya untuk pembangunan suatu wilayah sebagai upaya dalam mewujudkan keteraturan dalam penggunaan sumber daya demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Mengembangkan luas wilayah agar belanja modal semakin besar (Retno & Widiatmoko, 2019). Daerah yang lebih luas maka akan membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik demi memenuhi kebutuhan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang mengakibatkan naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut .

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Widiasmara, 2019), (Retno & Widiatmoko, 2019), dan (Latuconsina, 2017) yang menunjukkan bahwa Belanja Modal mempengaruhi Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengonfirmasikan data empiris dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021). Jumlah populasi sebanyak 29 kabupaten dan 9 kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling* jenuh yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel sehingga total sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 sampel.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya H_1 dapat diterima.
- 2) Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Luas Wilayah sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya H_2 dapat diterima.
- 3) Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Belanja Modal sebesar 0,111. Nilai signifikansi $0,111 > 0,05$ artinya H_3 ditolak.
- 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,00. Nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ artinya H_4 dapat diterima.
- 5) Luas Wilayah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Luas Wilayah sebesar 0,00. Nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ artinya H_5 dapat diterima.

- 6) Belanja Modal mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan nilai B hitung variabel Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal sebesar -3,373. Nilai B hitung $-3,373 < 4,696$ artinya H_6 ditolak.
- 7) Belanja Modal mempengaruhi Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan nilai B hitung variabel Luas Wilayah melalui Belanja Modal sebesar 0,00. Nilai signifikansi $0,00 < -0,006$ artinya H_7 dapat diterima.

4.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen dan satu variabel intervening yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Luas Wilayah, dan Belanja Modal.
- 2) Penelitian ini mengkaji masing-masing variabel independen dan variabel dependen selama tiga periode saja yaitu dari tahun 2019-2021 sehingga hal ini belum mampu menggambarkan secara jelas semua faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.3 Saran

Setelah menganalisis hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterbatasan variabel independen dan variabel intervening pada penelitian ini, saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebaiknya menambah variabel independen dan variabel intervening yang memiliki cakupan luas sehingga memperoleh hasil kesimpulan yang lebih baik dan dapat menggambarkan secara jelas faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi penelitian selanjutnya, periode pengamatan dalam penelitian disarankan untuk ditambah sehingga dapat menggambarkan secara jelas jangkauan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. Made. (2015). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten dan Kota di Bali Tahun 2008-2013. *Researchgate*, 1–35. <http://www.researchgate.net/publication/318636461>
- Kurniasari, R. & Kurnia. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2019). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-23.
- Marseno, S. & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/29>
- Pratama, I.G.N.P.T. & Kartika, I. N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6(11), 2228-2263.
- Setiawan, K.P., & Budiana, D.N. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(10), 1276–1303.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1-17. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Rakhmawati, Z., Nazar, M.R., Zutilisna, D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2014). *e-Proceeding of Management*, 4(2), 1709.
- Verawaty, Wahasusmiah, R., & Amnah. (2020). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Alokasi Belanja Modal. *Temu Dosen & Call for Paper*, 1-15.
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45-56. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id /index.php/jifa>
- Zaufi, M.Y., Taufik, T., & Agusti, R . (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 31–42.

- Astri, M., Nikensari, S.I., & Kuncara, H.W. . (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 77–102. <http://www.jpceb.net>
- Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 523-532.
- Juliarini, A. (2018). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi di Pulau Jawa. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2018*, 934–957.
- Latuconsina, Z.M.Y. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202-216.
- Novitasari, D. & Khikmah, L. (2019). Penerapan Model Regresi Spasial pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah. *Statistika*, 19(2), 123–134.
- Fidrdayanti, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2018). Ringkasan skripsi Eriska Firdayanti pdf.
- Sarkoro, H. & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54-63.
- Hendriyani, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015. [http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH PUBLIKASI](http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH_PUBLIKASI)
- Setiawan, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. [http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH PUBLIKASI](http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH_PUBLIKASI)
- Adiputra, I. Made. (2015). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten dan Kota di Bali Tahun 2008-2013. *Researchgate*, 1–35. <http://www.researchgate.net/publication/318636461>
- Kurniasari, R. & Kurnia. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2019). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-23.
- Marseno, S. & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli

- Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/29>
- Pratama, I.G.N.P.T. & Kartika, I. N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6(11), 2228-2263.
- Setiawan, K.P., & Budiana, D.N. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(10), 1276–1303.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1-17. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Rakhmawati, Z., Nazar, M.R., Zutilisna, D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2014). *e-Proceeding of Management*, 4(2), 1709.
- Verawaty, Wahasusmiah, R., & Amnah. (2020). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Alokasi Belanja Modal. *Temu Dosen & Call for Paper*, 1-15.
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45-56. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Zaufi, M.Y., Taufik, T., & Agusti, R. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 31–42.
- Astri, M., Nikensari, S.I., & Kuncara, H.W. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 77–102. <http://www.jpjeb.net>
- Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 523-532.
- Juliarini, A. (2018). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi di Pulau Jawa. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2018*, 934–957.

- Latuconsina, Z.M.Y. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202-216.
- Novitasari, D. & Khikmah, L. (2019). Penerapan Model Regresi Spasial pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah. *Statistika*, 19(2), 123-134.
- Fidridayanti, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2018). Ringkasan skripsi Eriska Firdayanti pdf.
- Sarkoro, H. & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54-63.
- Hendriyani, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015. [http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH PUBLIKASI](http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH_PUBLIKASI)
- Setiawan, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. [http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH PUBLIKASI BARU.pdf](http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH_PUBLIKASI_BARU.pdf)
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK*, 12(2), 74-91.
- Frete, P. N. D. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, 2(2), 1-33.
- Yovita, Farah M. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten Se-Indonesia Tahun 2008-2010). Ringkasan skripsi Farah Marta Yovita pdf.
- Zakaria, Rizaldi. (2018). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2010-2016. *Jurnal Akuntansi Universitas Islam Indonesia*, 1-19.
- Mirza, Denni Sulistio. (2019). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009 . *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 1-15 . <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Prasetya, Ferry. (2012). Modul Ekonomi Publik: Teori Pengeluaran Pemerintah. Prasetya Modul Ekonomi Publik Bagian V pdf.

- Utami, D. N. & Indrajaya, I.G.B. (2019). Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8 (10): 2195 - 2225.
- Umiyati, E., Amril, & Zulfanetti. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosiohumaniora*, 29-37.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Ringkasan Anggaran dan Belanja Daerah* (hal. 1–20).
- Tarumingkeng, W. A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, T.O. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(2), 82-95.
- Sasana, Hadi. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 1-12.
- Pratowo, Nur Isa. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaru Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia Universitas Sebelas Maret*, 15-31.
- Saputra, Whisnu A. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Ringkasan Skripsi Whisnu A. Saputra pdf.
- Assyurriani, Raja. (2015). Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010-2013. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*. 1-19.
- Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). *Universitas Diponegoro*. Ringkasan Skripsi Ardhini pdf.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2), 150-167. <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Syamsuri, M. R. & Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Info Artha Politeknik Keuangan Negara STAN*, 2(1), 11-28. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA
- Chalid, N. & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Perumbuhan Ekonomi Terhadap

- Indeks Pembangunan Manusia Di Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1-12.
- Heka, A.J.L., Lopian, A., & Lajuck, I. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 206-217.
- Muliza, Zulham, T., & Seftarita, C. . (1976). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51-69.
- Pambudy, A.P., & Syairozi, M.I. . (2019). Analisis Peran Belanja Modal Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *EKOBIS*, 20(1), 26-39.
- Panggabean, M., & Matondang, E. R. L. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017. *Prosiding SATIESP 2019*, 154-164.
- Sanggalorang, S.M.M., Rimate, V.A., & Siwu, H.F.DJ. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02), 1-11.
- Sembiring, Erika Apulina. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal*, 1(2), 161-170.
- Widiantoro, Ilham. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2011-2014. Ringkasan Skripsi Ilham Widiantoro pdf.
- Setiawan, M.B. & Hakim, Abdul. (2013). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 19-26. BARU.pdf
- Statistik, Badan Pusat. (2022). *Literasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. www.jatim.bps.go.id